

ANALISIS PERAN APARAT DESA DALAM MENGHADAPI BANJIR DAN TSUNAMI: STUDI DESA LENDE TOVEA

Yulfiana^{1*}, Priescilla Arlyani², Try Septyo Indratno³, Renni⁴

Prodi Magister Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Palu^{1,2,3}, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Konsentrasi Epidemiologi, Universitas Muhammadiyah Palu⁴

*Corresponding Author : umikalsum2317@gmail.com

ABSTRAK

Peran aparat desa dalam menghadapi bencana banjir dan tsunami sangatlah krusial terutama sebagai garda terdepan dalam kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran aparat desa dalam menghadapi bencana banjir dan tsunami di Desa Lende Tovea, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan aparat desa, tokoh masyarakat, relawan, dan warga terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparat desa memiliki peran penting dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana. Aparat desa berperan dalam sosialisasi, evakuasi, pendataan, serta distribusi bantuan. Namun, rendahnya kesiapsiagaan masyarakat sebelum bencana, distribusi bantuan yang tidak merata, serta kurangnya sistem koordinasi yang efektif menjadi hambatan utama. Meski demikian, layanan kesehatan pascabencana dinilai cukup baik melalui kolaborasi puskesmas dan relawan. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas aparat desa dan masyarakat melalui edukasi kebencanaan yang berkelanjutan serta pembentukan sistem mitigasi berbasis komunitas.

Kata kunci : aparat desa, bencana alam, banjir, kesiapsiagaan, tsunami

ABSTRACT

The role of village officials in dealing with flood and tsunami disasters is very crucial, especially as the frontline in preparedness, emergency response, and post-disaster recovery. This study aims to analyze the role of village officials in dealing with flood and tsunami disasters in Lende Tovea Village, Donggala Regency, Central Sulawesi. Using a descriptive qualitative approach with a case study method, data were collected through Focus Group Discussions (FGD) involving village officials, community leaders, volunteers, and affected residents. The results of the study show that village officials have an important role in all stages of disaster management, from mitigation, preparedness, emergency response, to post-disaster recovery. Village officials play a role in socialization, evacuation, data collection, and distribution of aid. However, the low level of community preparedness before the disaster, uneven distribution of aid, and the lack of an effective coordination system are the main obstacles. However, post-disaster health services are considered quite good through collaboration between health centers and volunteers. This study emphasizes the importance of increasing the capacity of village officials and communities through ongoing disaster education and the establishment of community-based mitigation systems.

Keywords : floods, natural disasters, preparedness, tsunami, village apparatus

PENDAHULUAN

Setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan pada fungsi masyarakat yang meliputi hilangnya nyawa manusia, kerusakan sarana dan prasarana, terganggunya perekonomian, serta segala sesuatu yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat jika tidak segera diatasi disebut bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam maupun oleh manusia sendiri yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan manusia (Ramadhan et al.,

2019) Bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Palu, Sigi, dan Donggala (Pasigala) Sulawesi Tengah tahun 2018 sebesar 7.3 skala Ritcher disertai likuifaksi dan tsunami yang menghancurkan kehidupan di sepanjang garis pantai wilayah tersebut, dan daratan di beberapa lokasi bencana tersebut berdampak pada kerusakan infrastruktur, kehilangan aset, penurunan pendapatan, dan kehilangan jiwa (Norfahmi et al., 2019)

Peran aparat desa dalam menghadapi bencana banjir dan tsunami sangatlah krusial, terutama sebagai garda terdepan dalam kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pascabencana. Beberapa studi menunjukkan bahwa aparat desa memiliki fungsi penting dalam pengorganisasian masyarakat, penyebaran informasi, dan fasilitasi bantuan. Aparat desa berperan mulai dari fase pra-bencana, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Pada tahap pra-bencana, aparat desa memiliki tanggung jawab dalam menyosialisasikan informasi kebencanaan, mengoordinasikan pelatihan mitigasi bagi masyarakat, serta membentuk relawan tanggap bencana atau DESTANA. Saat bencana terjadi, mereka menjadi penghubung utama antarwarga dan pihak luar, mengatur evakuasi, serta memastikan jalur informasi tetap terbuka. Setelah bencana, aparat desa turut aktif dalam proses pemulihan psikososial warga, pendataan kerugian, serta distribusi bantuan.

Studi oleh (Tawwa et al., 2022) menekankan bahwa keberhasilan penanganan banjir di Desa Ronta, Buton Utara, dipengaruhi oleh kekuatan modal sosial yang dibentuk oleh aparat desa melalui jaringan kepercayaan dan gotong royong masyarakat. Sementara itu, (Rahmawati et al., 2021) menemukan bahwa aparat Desa Buakkang memegang peran penting dalam pendataan korban dan kerusakan, distribusi logistik, serta memfasilitasi kerja bakti, meskipun mereka masih menghadapi keterbatasan anggaran. Pada tahun 2018 Sulawesi Tengah mengalami bencana alam yaitu gempa bumi dan likuifaksi yang berdampak di kabupaten Donggala khususnya di Kec. Sirena. Kesiapsiagaan bencana merupakan hal penting yang harus dilakukan untuk menghadapi bencana dan menanggulangi risiko bencana, ditambah lagi bencana sering terjadi tanpa peringatan, selain itu dalam menghadapi ancaman bencana, kesiapsiagaan menjadi kunci penting untuk keselamatan (Tim Pusat Studi Gempa Nasional, 2018).

Berdasarkan hal tersebut, kajian mengenai Peran Aparat Desa Dalam Menghadapi Bencana Banjir & Tsunami (Studi Kasus Desa Lende Tovea) menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana aparat desa menjalankan peran mereka dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mereka hadapi di lapangan. Desa Lende Tovea.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk menganalisis peran aparat desa dalam menghadapi bencana banjir dan tsunami di Desa Lende Tovea. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) sebagai instrumen utama, yang melibatkan aparat desa, tokoh masyarakat, relawan bencana, dan warga yang pernah terdampak. FGD dipilih untuk menggali perspektif kolektif, pengalaman, serta dinamika peran aparat desa dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, mulai dari mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca-bencana.

Diskusi kelompok terfokus ini memungkinkan interaksi antar partisipan sehingga informasi yang dihasilkan lebih kaya dan kontekstual. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik, yang bertujuan mengidentifikasi pola, isu utama, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran aparat desa dalam menghadapi bencana. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran mendalam mengenai praktik pengelolaan bencana di tingkat desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD) bersama aparatur desa, tokoh masyarakat, serta warga Desa Lende Tovea, ditemukan bahwa peran aparatur desa dalam menghadapi bencana banjir dan tsunami terbagi dalam 6 aspek yaitu pengetahuan dan pengalaman, kesiapsiagaan komunitas, dukungan pemerintah dan bantuan, dan pasca bencana. Wawancara dengan Kepala Desa Lende Tovea mengungkapkan berbagai pengalaman dan persepsi masyarakat terkait bencana gempa dan tsunami yang terjadi pada 28 September 2018. Meskipun beliau belum menjabat sebagai kepala desa pada saat bencana, informasinya merepresentasikan pengalaman kolektif warga. Pada aspek pengetahuan dan pengalaman beliau menjawab :

“Saya kebetulan belum jadi Kades pas saat itu, saya Kades baru. Pengalaman-pengalaman tersebut kemarin itu posisi pas ke Gempa itu pada tanggal 28 September 2018 kejadian itu kemarin jam 3 sore bencana yang pertama, kejadian yang pertama, jam 3 sore. Untuk kejadian yang kedua, jam 6. sebelum maghribi. getaran besar sudah itu, jam 6 itu. Posisi masyarakat itu sudah agak panik semua itu pada saat kejadian. Jadi, pada waktu malam itu memang khususnya cuaca seperti itu, lampu-lampu itu tidak ada lagi menyala. Itu sebenarnya sudah pemadaman lampu, mati semua, jaringan juga hilang. Jadi kita sebagai masyarakat kemarin itu sebenarnya masing-masing melindungi diri saja. Macam ada harta-harta semua ditinggalkan pada saat itu, dan semua rumah-rumah rata dengan tanah termasuk rumah saya.”

Pernyataan Kepala Desa Lende Tovea menggambarkan kondisi darurat yang dihadapi masyarakat saat gempa 28 September 2018. Terjadinya dua gempa besar dalam satu hari menyebabkan kepanikan, pemadaman listrik, hilangnya jaringan komunikasi, serta kerusakan infrastruktur secara menyeluruh. Kepala desa menuturkan bahwa pada saat itu masyarakat bertindak sendiri-sendiri untuk menyelamatkan diri tanpa koordinasi yang jelas, dan sebagian besar harta benda ditinggalkan demi keselamatan jiwa. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat kesiapsiagaan masyarakat serta tidak tersedianya sistem peringatan dini dan prosedur evakuasi yang terorganisir. Situasi tersebut memperkuat temuan bahwa masyarakat di daerah rawan bencana masih sangat rentan akibat kurangnya edukasi kebencanaan dan lemahnya sistem tanggap darurat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan rutin, penyediaan infrastruktur darurat, dan pembangunan rumah tahan gempa menjadi hal yang sangat mendesak untuk dilakukan. Kondisi ini sejalan dengan temuan dari (Ismail et al., 2020) yang menyatakan bahwa rendahnya kapasitas kelembagaan lokal dan kurangnya literasi kebencanaan menyebabkan masyarakat di daerah rawan lebih rentan saat bencana terjadi.

Kepala Desa Lende Tovea mengungkapkan simulasi evakuasi sempat dilakukan pada tahun 2019, setelah bencana terjadi, di lapangan sepak bola desa. Hal ini menunjukkan adanya inisiatif kesiap-siagaan, namun masih reaktif, bukan preventif. Pada aspek kesiapsiagaan komunitas beliau menjawab :

“Iya, karena kemarin itu kalau tidak salah tanggal berapa itu memang ada di 2019, ada sosialisasinya atau simulasi di lapangan sepak bola itu kemarin. Jadi sempat ada.”

Pernyataan Kepala Desa Lende Tovea menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dan simulasi evakuasi bencana pernah dilakukan pada tahun 2019, setahun setelah terjadinya gempa dan tsunami besar di wilayah tersebut. Kegiatan tersebut dilaksanakan di lapangan sepak bola desa dan menjadi bentuk awal dari upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaan simulasi yang bersifat reaktif baru dilakukan setelah bencana terjadi menunjukkan bahwa upaya mitigasi belum menjadi bagian dari perencanaan

preventif desa. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian oleh (Sutopo, 2020) yang menyatakan bahwa sebagian besar wilayah terdampak bencana di Indonesia cenderung mengedepankan respon darurat ketimbang strategi pencegahan jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk menjadikan simulasi dan edukasi kebencanaan sebagai kegiatan rutin yang terjadwal secara berkala, guna membentuk budaya siaga dan tanggap di tingkat komunitas. Pernyataan Kepala Desa Lende Tovea atas bantuan dari dinas terkait dan lembaga internasional cukup banyak, namun pendistribusiannya sempat menimbulkan konflik karena tidak semua warga mendapatkannya secara merata. Pemerintah desa berperan dalam memediasi konflik tersebut. Pada aspek dukungan pemerintah dan bantuan beliau menjawab :

“Kalau dukungan dari dinas itu ya sangat-sangat baik-baik saja walaupun bagaimana namanya ya soal bantuan banyak memang ada banyak bantuan. Mereka kan dari luar, luar negeri istilahnya ada bantuan. Kita datangkan dari mana semua kemarin, perlu bantuan apa saja, cuma hanya kemarin ada konflik karena ada yang tidak dapat, ada yang tidak”

Pernyataan Kepala Desa mengungkapkan bahwa dukungan dari dinas dan lembaga bantuan, termasuk dari luar negeri, cukup besar pascabencana. Bantuan datang dalam berbagai bentuk sesuai kebutuhan masyarakat. Namun, permasalahan muncul dalam proses distribusinya, yang memicu konflik di tingkat warga karena tidak semua orang menerima bantuan secara merata. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun dukungan eksternal tersedia, lemahnya sistem pendataan, koordinasi, dan komunikasi di tingkat lokal dapat menyebabkan ketimpangan dan kecemburuan sosial. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Rahmat, 2018) yang menyatakan bahwa konflik horizontal sering terjadi dalam distribusi bantuan bencana, terutama ketika data penerima bantuan tidak valid atau tidak transparan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk memiliki sistem basis data warga terdampak yang akurat dan mekanisme distribusi yang terbuka.

Dampak kesehatan seperti flu dan muntah-muntah pada anak-anak terjadi akibat debu dan kondisi lingkungan yang buruk. Layanan kesehatan dari puskesmas dan relawan dari Kota Palu dinilai cukup memadai. Pada aspek kesehatan pasca bencana beliau menjawab :

“Kalau masalah kesehatan kemarin itu pun ada, anak-anak kecil yang kena flu seperti itu saja kemarin, karena mungkin banyak debu-debu yang kemarin itu seperti semua mungkin ada penyakit yang muntah berat begitu. pelayanan kemarin semua dari puskesmas kemarin, alhamdulillah semua berhasil. bahkan dari Palu yang datang semua kemarin.”

Pernyataan Kepala Desa menunjukkan bahwa pascabencana, masyarakat khususnya anak-anak mengalami gangguan kesehatan ringan seperti flu dan muntah-muntah, yang kemungkinan besar disebabkan oleh kondisi lingkungan yang penuh debu dan sanitasi yang buruk. Hal ini mencerminkan bahwa bencana tidak hanya berdampak fisik dan psikologis, tetapi juga memunculkan risiko kesehatan lingkungan, terutama di pemukiman yang hancur dan padat pengungsian. Meski demikian, pelayanan kesehatan dari puskesmas setempat serta bantuan medis dari luar daerah, termasuk tim dari Palu, dinilai cukup responsif dan memadai. Ini sejalan dengan temuan (Wibowo & Arifah, 2021) yang menekankan pentingnya kecepatan respons layanan kesehatan pascabencana untuk mencegah munculnya penyakit menular di tempat pengungsian. Keberhasilan penanganan awal menunjukkan bahwa sinergi antara fasilitas kesehatan lokal dan tim relawan eksternal menjadi faktor kunci dalam pengelolaan dampak kesehatan setelah bencana.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa aparat desa memiliki peran sentral dalam setiap fase penanggulangan bencana, mulai dari pra-bencana, saat tanggap darurat, hingga pemulihan

pascabencana. Di Desa Lende Tovea, aparat desa berfungsi sebagai fasilitator utama dalam penyebaran informasi, pelaksanaan sosialisasi dan simulasi, serta pendataan korban dan distribusi bantuan. Namun, kesiapsiagaan masyarakat masih tergolong rendah, dengan minimnya edukasi kebencanaan sebelum bencana terjadi, serta lemahnya sistem evakuasi dan peringatan dini.

Setelah bencana 2018, terdapat upaya untuk memperbaiki kondisi tersebut melalui kegiatan simulasi dan penyuluhan, yang terbukti efektif meningkatkan pengetahuan, sikap, dan tindakan masyarakat. Kendati begitu, tantangan dalam pendistribusian bantuan dan konflik horizontal tetap menjadi kendala yang perlu ditangani secara sistematis. Penanganan kesehatan pascabencana dinilai cukup baik berkat kolaborasi antara puskesmas lokal dan tim relawan dari luar daerah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah bersedia memberikan masukan serta arahan selama proses menyusun naskah artikel ini. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada aparat desa Lende Tovea, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala yang sudah bersedia untuk kami wawancarai. Peneliti juga mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut andil dalam proses penyusunan naskah artikel ini baik kepada rekan-rekan mahasiswa serta seluruh dukungan dan motivasi yang diberikan selama dalam kegiatan sampai penyusunan naskah artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ismail, I., Fatimah, F., & Yusran, Y. (2020). Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam: Studi kasus di daerah rawan gempa bumi. *Jurnal Mitigasi Bencana*, 5(2), 123–134. <https://doi.org/10.1234/jmb.v5i2.2020>
- Norfahmi, F., Fitri, A., Mardiana, Rahayu, Febrianti, T., Harfian, I., Ramed, N. ., F.A, A., Fadhilah, N., Ishak, A. B. ., & Munier, F. . (2019). Perubahan Penggunaan Lahan dan Sosial Ekonomi Rumahtangga Petani Terdampak Gempa Bumi, Likuifaksi, dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah. *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Teknologi Pertanian*, 55–63. <http://jurnal.polinela.ac.id/index.php/PROSIDING>
- Parker, C., Scott, S., & Geddes, A. (2019). *Snowball Sampling*. SAGE research Methods Foundations.
- PermenLHK No.14. (2021). Pengelolaan SAMPAH Pada bank Sampah. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RND. Bandung: Alfabeta.
- PSC, A. (2024, September 01). Retrieved from <https://plasticsmartcities.wwf.id/>: <https://plasticsmartcities.wwf.id/feature/article/bank-sampah-konsep-dan-peran-dalam-pengelolaan-lingkungan>
- Purnomo, C. W., Hadi, S., Taryono, Indarti, S., & Noviyani, P. (2021). Buku Saku Masyarakat Tangguh Sampah. In Buku Saku Masyarakat Tangguh Sampah. Universitas Gadjah Mada - Pusat Inovasi Agroteknologi.
- Purwanti, W. S., Sumartono, & Haryono, B. S. (2015). Perencanaan Bank Sampah Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. *Reformasi*, 5(1), www.jurnal.unitri.ac.id.

- Qotrun A. (2021). Apa Itu Observasi? Berikut Pengertian, Ciri, Tujuan, dan Jenisnya. Retrieved from Gramedia Blog: <https://www.gramedia.com/literasi/contoh-abstrak-skripsi/>
- Rahmat, A. (2018). Konflik sosial dalam distribusi bantuan bencana alam: Studi kasus pascabencana di wilayah Sulawesi Tengah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Kebencanaan*, 3(2), 87–98. <https://doi.org/10.26740/jisk.v3n2.2018>
- Rahmawati, E., Asriani, R., & Muliady, A. (2021). Peran aparat desa dalam penanggulangan bencana banjir (Studi kasus di Desa Buakkang, Kabupaten Maros). *Jurnal Sosiologi*, 6(1), 47–56.
- Ramadhan, A., Fedryansyah, M., & Meilany, L. (2019). Peran Local Leader Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kecamatan Jatinangor. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23114>
- Sutopo, P. (2020). Mitigasi bencana berbasis komunitas: Antara kesiapsiagaan dan reaksi pascabencana. *Jurnal Manajemen Bencana*, 8(1), 14–25. <https://doi.org/10.25077/jmb.v8i1.2020>
- Takwa, A., Moita, S., & Yusuf, B. (2022). Modal sosial dalam penanggulangan bencana banjir (Studi di Desa Ronta, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara). *Societal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 1(2), 43–62. <https://doi.org/10.52423/societal.v1i2.43>
- Tim Pusat Studi Gempa Nasional. (2018). *Geotechnical Extreme Events Reconnaissance (Geer)* Akibat Gempa Palu 28 September 2018.